LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode yang Berakhir

30 Setember Tahun 2024

Bagian Anggaran 005.01.652080

(Badan Urusan Administrasi MA-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bontang

Bontang - Kalimantan Timur 75311

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 30 September 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bontang, 18 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yuri Adi Dharma S.Kom
NIP 198501172006041001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	44

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Jalan Awang Long No 69 Bontang Telp. (0548) 23001

Email : kantor.pabontang@gmail.com

BONTANG - 75311

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 18 Oktober 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP. 19850117200604 2002

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3,582,575. atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan- LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 2,728,143,174 atau mencapai 78 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2,728,143,174.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2024.

Nilai Aset per 30 September 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 7,552,618,792 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 21,358,175Aset Tetap (neto) sebesar Rp Rp 7,531,260,617

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 208,743,895 dan Rp 7,343,874,897.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp 2,677,824,886 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(2,674,242,311)Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp (2,674,242,311)sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(2,674,242,311)).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 7,294,348,434 dikurangi Defisit- LO sebesar Rp.(2,674,242,311) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas senilai Rp (1,150,000) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2,724,918,774 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 September 2024 adalah senilai Rp 7,343,874,897.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BONTANGLAPORAN
REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2024		% thd Angg	30 SEPTEMBER 2023	% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	3,224,4000	0.00	-	0.00
JUMLAH PENDAPATAN		-	3,224,4000	**0.00**	-	**0.00**
BELANJA	**B.2.**					
Belanja Pegawai	B.3	2,036,630.000	1,558,615,664	77.00	1,437,877,673	76.00
Belanja Barang	B.4	1,090,863,000	817,027,510	75.00	884,930,396	73.00
Belanja Modal	B.5	376,200,000	352,500,000	94.00	0	0
	B.6					
JUMLAH BELANJA		**3,503,693,000**	**2,728,143,174**	78.00	2,322,808,069	76.00

PENGADILAN AGAMA BONTANG
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(DalamRupiah)

Uraian	Catatan	30 September 2024	30 SEPTEMBER 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	21,000,000	0
Piutang Bukan Pajak	C.10	358,175	0
Jumlah Aset Lancar		21,358,175	0
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2.042.591.548	2.042.591.548
Peralatan dan Mesin	C.15	2.927.836.878	2.521.691.978
Gedung dan Bangunan	C.16	5.845.037.768	9,635,599,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17		-
Aset Tetap Lainnya	C.18	3.427.109	3,427.109
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3.287.632.686)	(3,157,879,425)
Jumlah Aset Tetap		7.531.260.617	7.297.013.878
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	4.950.000	4,950,000
Aset Lain-Lain	C.22		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(4.950.000)	(4.950.000)
Jumlah Aset Lainnya			**0**
JUMLAH ASET		**7,552,618,792**	**7,297,013,878**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Pihak Ketiga	C.25		136.913.621
Uang Muka dari KPPN		161.752.895	2.665.444
Utang yang Belum Ditagihkan		14.491.00	192.913.621
Hibah Yang Belum Disahkan		11.500.000	0
Uang Muka dari KPPN		21.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN		**208,743,8950**	**2,665,4440**
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.31	7.343,874.897	**7,297,013,878**
JUMLAH EKUITAS DANA		7.343,874.897	**7,297,013,878**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**7.552,618.792**	**7,297,013,878**

PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2024	30 SEPTEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3,582,575 -	-
JUMLAH PENDAPATAN		3,582,575 -	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,696,156,559	1.540.725.294
Beban Persediaan	D.3	13,797,300	8.818.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	474,405,768	551.264.659
Beban Pemeliharaan	D.5	305,835,962	285.948.992
Beban Perjalanan Dinas	D.6	59,026,036	56.946.545
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		-
Beban Bantuan Sosial	D.8		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	128,603,261	187.482.105
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		-
JUMLAH BEBAN		2,677,824,886	**2.631.185.595**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,674,242,311)	**(2.631.185.595)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			-
Defisit Selisih Kurs			-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,674,242,311)	**(2.631.185.595)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP			-
Beban Perjalanan Dinas			-
Beban Persediaan			-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2,674,242,311)	**(2.631.185.595)**

PENGADILAN AGAMA BONTANGLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 September 2024	30 SEPTEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	7.294.248.434	7.540.053.846
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.674.242.311)	(2.631.185.596)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		(1.150.000)-	-
EKUITAS YANG ATARA LAIN BERASAL DARI			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN			
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	(1.150.000)-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.7	-	
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2.724.918.774	2.351.144.319
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		49.526.463	(280.071.276)
EKUITAS AKHIR	E.8	**7.343.874.897**	**7.259.982.566**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bontang

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menter! Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /Pmk.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi. Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long No 69, Kota Bontang

Kantor Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi **"Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang yang Agung"** Misi Pengadilan Agama Bontang adalah Misi Pengadilan Agama Bontang adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama.
4. Meningkatkan Kredibilitas, dan Transparansi Pengadilan Agama Bontang Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut

Pengadilan Agama Bontang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Kepaniteraan :

   - Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
   - Meningkatkan administrasi perkara secara profesional, efisein dan efektip.
   - Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan identitas Hukum ;
   - Pembatasan Perkara Kasasi
   - Proses Berperkara yamg Sederhana Cepat dan Biaya Ringan
   - Penguatan Akses Peradilan serta Meningkatkan pengawasan dan menciptakan kondisi kerja yang harmonis.
   - Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

2. Bidang Kesekretariatan :

   - Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan bagi aparat Tenaga Teknis
   - Meningkatkan disiplin pegawai dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 (hari) kerja sesuai dengan kinerja aparat peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung.
   - Menertibkan administrasi data kepegawaian dengan mengaplikasikan Sistem Informasi kepegawaian (SIMKEP)
   - Meningkatkan Hasil Penelitian dan Sumber daya manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
   - Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Perasdilan Secara Optimal

- ☐ Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Manuasia Keuangan dan Aset
- ☐ Menertibkan prosedur usul kenaikan pangkat tepat waktu.
- ☐ Meningkatkan SDM pegawai.
- ☐ Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ☐ Meningkatkan penyusunan anggaran tahun yang akan datang.
- ☐ Melaksanakan persuratan dan perlengkapan kantor.
- ☐ Melaksanakan adminstrasi perpustakaan secara tertib

Pendek atan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bontang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung	50%

	sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat MusikModern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasipenyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsun

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkrualPertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai Tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 SEPTEMBER 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2022 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B.1 Pendapatan

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Bontang* tidak ada mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Realisasi Pendapatan

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 adalah sebesar Rp 3,224,400. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Bontang terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

B.1 Pendapatan

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan negara bukan pajak	-	3,224,400 -	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	3,224,400 **-**	-

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 tidak mengalami penurunan/kenaikan 0 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Kantor Pengadilan Agama Bontang

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 September 2024 dan 30 SEPTEMBER 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan negara bukan pajak	3,224,400	0	(100.00)
Jumlah	3,224,400	0	**(100.00)**

Realisasi Belanja Negara **B2. Belanja**

Rp.**2,728,143,174**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 2,728,143,174 atau 58.92% dari anggaran belanja sebesar Rp.3,503,693,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real/Angg.
Belanja Pegawai	2,036,630,000	1,558,615,664	77.00
Belanja Barang	1,090,863,000	817,027,510	75.00
Belanja Modal	376,200,000	352,500,000	94.00
Total Belanja Kotor	**3,503,693,000**	**2,728,143,174**	**78.00**
Pengembalian	-	**0**	0
Jumlah	**3,503,693,000**	**2,728,143,174**	**78.00**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihatdalam grafik berikut ini:

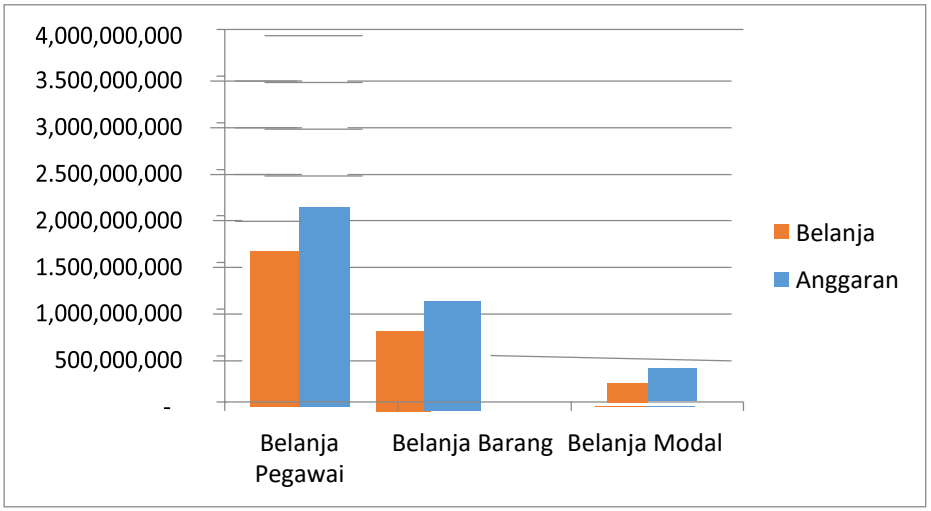

Realisasi Belanja TA 2024 mengalami Kenaikan sebesar 16% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,558,615,664	1,437,877,67	10.088.
Belanja Barang	817,027,510	884,930,396	108
Belanja Modal	352,500,000	0	100
Jumlah	2,728,143,174	2,322,808,069	**85.14**

Belanja Pegawai
Rp 1,558,615,664

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,558,615,664 dan Rp 1,437,877,67 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 79.2% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Belanja Barang
Rp 817,027,510

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp, 817,027,510 dan Rp 884,930,396. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 108% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja Kebutuhan sehari hari pegawai yang di harus dipenuhi di Pengadilan Agama Bontang di Tahun 2024

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	407,011,046	464,778,327	(0.87)
Belanja Barang Non Operasional	0	7,268,000	
Belanja Barang Persediaan	12,741,300	8,998,000	2.87
Belanja Barang Jasa	47,608,166	60,990,532	**2.00**
Belanja Pemeliharaan	293,860,962	285,948,992	
Belanja Perjanana Dinas	55,806,036	56,946,545	
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	817,027,510	884,930,396	**2.00**

Belanja Modal

Rp. 352,500,000

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp. 352,500,000 dan Rp.0 Realisasi Modal TA 2024 mengalami kenaikan 100% dari Realisasi Belanja Modal Barang TA 2023. Hal ini dikarenakan di tahun 2023 tidak adanya pagu belanja modan dan di tahun 2024 terdapat pagu belanja Modal yang diperoleh Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

ASET LANCAR

Rp. **21,358,175**

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 21,000,000

C1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 sebesar Rp 21,000,000.

Piutang bukan pajak Rp.358.175

Rp5.845.037.768

C.2 Piutang Bukan Pajak

Terdapat Nilai Piutang bukanPajak per 30 September 2024 sebesarRp 358.175

Barang Persediaan Rp.0

C3. Barang Persediaan

Terdapat Nilai Persediaan per 30 September 2024 sebesarRp 0

ASET TETAP Rp. 7,552,618,792

Tanah

Rp. 2.042.591.548

C.4 Tanah

Terdapat Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bontang per 30 September 2024 sebesar Rp.2.042.591.548.

Peralatan dan Mesin

Rp. 2,927,836,878

C.5 Peralatan dan Mesin

Terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 sebesar Rp. 2,927,836,878

Gedung dan Bangunan

C.6 Gedung dan Bangunan

Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September2024 sebesar Rp5.845.037.768

Aset Tetap Lainnya Rp3,427.109

C.7 Aset Tetap Lainnya

Terdapat.Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2024 sebesar Rp3,427.109

Akumulasi Penyusutan

*Rp.(*3,287,632,686)

C.8 *Akumulasi Penyusutan*

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan per 30September 2024 sebesar Rp(3,287,632,686)

ASET LAINNYA

***Rp.* 7,552,618,792**

Aset Tak Berwujud

Rp 4.950.000

Akumulasi Penyusutan /Amortisasi aset lainnya
Rp. (4,950,000)

KEWAJIBAN

***Rp.* 208,743,895**

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp 161,752,895

Utang Yang Belum Ditagihkan *Rp* 14,491,000

Hibah Yang Belum Disahkan *Rp* 11,500,000

Uang Muka dari KPPN
*Rp.*21,000,000

EKUITAS

***Rp.*7,343,874,897**

C.9 Aset Tak Berwujud

Terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2024 sebesar Rp.4.950.000

C.10 Akumulasi Penyusutan /Amortisasi aset lainnya

Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan /Amortisasi aset lainny*a* per 30September 2024 sebesar Rp (4,950,000).

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September2024 sebesar Rp 161,752,895

C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan

Terdapat Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 September 2024 sebesar Rp .14,491,000

C.13 Hibah Yang Belum Disahkan

Terdapat Hibah Yang Belum Disahkan per 30 September 2024 sebesar Rp 11,500,000

C.14 Uang Muka dari KPPN

Terdapat Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 sebesar Rp 21,000,000

C.15 Ekuitas

Terdapat Ekuitas per 30 September 2024 sebesar Rp.7,343,874,897

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

Rp. **3,582,575**

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terdapat Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024. dan 2023 adalah sebesar Rp 3,582,575 dan Rp0 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,582,575	-	100-

BEBAN

***Rp.* 2,677,824,886**

Beban Pegawai
R.p. 1,696,156,559

D.2 Beban Pegawai

Terdapat Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp. 1,696,156,559 dan 1.540.725.294

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	1,696,156,559	1.540.725.294	10.088

Beban Persediaan
Rp. 13,797,300

D.3 Persediaan

Terdapat Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 masing masing sebesar Rp 13,797,300 dan 8,818,000

Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	13,797,300	8.818.000	56.467

*Beban Barang danJasa Rp.*474,405,768

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 474,405,768 dan Rp. 551,264,659 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban barang dan Jasa	474,405,768	551.264.659	(13.942)

Beban Pemeliharaan Rp. 305,835,962

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 305,835,962 dan Rp. 285.948.992 Beban Pemeliharaan terdiri dari beban Pemeliharaan beban yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
pemeliharaan	305,835,962	285.948.992	6.955

*Beban Perjalanan Dinas Rp.*59,026,036

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: 59,026,036 dan Rp. 56.946.545 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	59,026,036	56.946.54	3.652

Beban Barang untuk Diserahkankepada Masyarakat ***Rp0***

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024

Beban Bunga Rp0

D.8 Beban Bunga

Tidak Terdapat Beban Bunga Tahun 2024

D.9 Beban Subsidi

Tidak Terdapat Beban Subsidi Tahun 2024

Beban Subsidi
Rp.0

D.10 Beban Hibah

Tidak Terdapat Beban Hibah Tahun 2024

Beban Hibah Rp0

D.11 Beban Bantuan Sosial

Tidak Terdapat Beban Hibah Tahun 2024

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Terdapat Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk T ahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: sebesar Rp. 128,603,261 dan 187,482,105

Beban Penyusutandan Amortisasi Rp. 128,603,261

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan dan Amortisasi	128,603,261	187,482,105	(31.405)

D13 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D11 Beban Tranfer

Tidak Terdapat Beban Tranfer Tahun 2024

Beban Tranfer Rp0

D.12 Beban Lain-lain

Tidak Terdapat Beban Tranfer Tahun 2024

Beban Lain-Lain Rp0

D13. Kegiatan Non Operasional

Terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut sebesar Rp.(2,631.185.595) dan (2,631,185,595)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Rp.(2.631.185.595)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	.(2,631.185.595)	(2,631,185,595)	1.636

D.11 Kegiatan Non Operasional

Tidak Terdapat Kegiatan NonOperasional Tahun 2024

Kegiatan Non Operasional

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0

Tidak terdapat Pos Luar Biasa untukTahun 2024

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp 7,294,348,434

E.1 Ekuitas Awal

Terdapat Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2024 dan tahun 2023 masing masing sebesar Rp 7,294,348,434 dan 7,540,053,842

Defisit LO Rp (2,674,242,311)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (2,674,242,311) dan Rp.(2.631.185.595) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas Rp.(1,150,000).

E.3 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Tidak terdapat Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk Tahun 2024 dan tahun 2023 masing adalah sebesar (1,150,000) dan Rp.0

Penyesuaian Nilai Aset Tetap Rp0

E.4 Penyesuaian Nilai Aset Tetap

Tidak terdapat Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap untuk Tahun 2024 dan tahun 2023

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset untuk Tahun 2024 dan 2023

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp.(1,150,000)

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Tidak terdapat Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk Tahun 2024 (1,150,000)

E.7 Koreksi Nilai Aset

Tidak terdapat Koreksi Nilai Aset untukTahun 2024

Koreksi Nilai Aset Lain-lain Rp0

E.8 Lain-lain

Tidak terdapat Informasi Lain-lain untukTahun 2024

Transaksi Antar Entitas Rp. 2,724,918,774

E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar entitas pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,724,918,774 dan Rp. 2,351,114,319

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Ekuitas Akhir Rp. 7,343,874,897

E.12 Transaksi Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Transaksi Transaksi Kenaikan/Penurunan pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7,343,874,897 dan Rp. 7.259.982.566

E.11 Transaksi Ekuitas Akhir

Nilai Transaksi Transaksi Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7,343,874,897 dan Rp. 7.259.982.566.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadia-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanjasecara Akrual

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secaraakrual pada Tahun 2022.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 653246520801000 atas Nama BPG 046 PENGADILAN AGAMA BONTANG dengan Surat izin rekening dari Kementerian Keuangan Nomor S-2732/WPB.12/KP.046/2020 tanggal 16 Oktober 2020

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Tidak Terdapat informasi Pengelolaan Uang Titipan Pada DIPA 652080.

F.2.5. Revisi DIPA dan POK

Terdapat Revisi DIPA per 30 September 2024. Antara lain adalah dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Revisi D I P A tanggal 31 Januari 2024 dalam rangka Revisi Administrasi dengan cara Pemuktahiran POK dengan pertimbangan Pengoptimalisasian penggunaan Anggaran yang terbatas;

2. Revisi D I P A tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka Revisi Administrasi dan Rencana penarikan dana halaman III DIPA dengan Cara Pemutakhiran POK dengan pertimbangan Penyesuaian Halaman III Dipa dan Pengoptimalisasian penggunaan Anggaran yang terbatas

3. Revisi D I P A tanggal 19 April 2024 dalam rangka Revisi Rencana penarikan dana halaman III DIPA dengan Cara Pemutakhiran POK dengan pertimbangan Penyesuaian Halaman III Dipa

4. Revisi DIPA tanggal 28 Mei 2024 dalam rangka Revisi Rencana penarikan dana halaman III DIPA dengan pertimbangan Pengoptimalisasi penggunaan Anggaran yang terbatas

5. Revisi DIPA tanggal 09 Juli 2024 dalam rangka Revisi Administrasi dengan cara Ralat rencana penarikan dana Halaman III DIPA dengan pertimbangan Penyesuaian Rencana Penarikan Halaman III DIPA

6. Revisi DIPA tanggal 09 Juli 2024 dalam rangka Revisi Eselon 1 Relaksasi Blokir Otomatic adjutmen

7. Revisi D I P A tanggal 07 Agustus 2024 dalam rangka Revisi Administrasi dengan cara Pemuktahiran POK dengan pertimbangan Pengoptimalisasian penggunaan Anggaran yang terbatas;

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM pada sampai dengan tanggal 30 September 2024.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Selama Tahun 2024 per 3 Januari 2024 tidak terjadi perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Bontang yaitu masing masing adalah :

1. Tim Pengelola Dipa Pengadilan Agama Bontang Nomor W17-A6/613/KU.01/V/2024. tanggal 03 Mei 2024

   Dengan rincian Sebagai Berikut:

   Kuasa Pengguna Anggaran :Yuri Adi Dharma, S.Kom.

   Pejabat Pembuat Komitmen : Yuri Adi Dharma, S.Kom.

   PejabatPenandatangan/PengujiSPM:AnaSyuryaningrum,S.H.I

   Bendahara Pengeluaran : Norma Ayu Anggraini . A.Md

   Bendahara Penerimaan : grace ramayani Effendi, A.Md

   Pejaba Pembuat Anggaran Belanja Pegawai : Fathul Majid, S.H.I

   Staf Pengelola : Awaluddin Nur, S. H.I

VI. LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 8:30 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,582,575	0	3,582,575	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,582,575	0	3,582,575	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,582,575	0	3,582,575	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,696,156,559	1,540,725,294	155,431,265	10.088
Beban Persediaan	13,797,300	8,818,000	4,979,300	56.467
Beban Barang dan Jasa	474,405,768	551,264,659	(76,858,891)	(13.942)
Beban Pemeliharaan	305,835,962	285,948,992	19,886,970	6.955
Beban Perjalanan Dinas	59,026,036	56,946,545	2,079,491	3.652
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 8:30 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	128,603,261	187,482,105	(58,878,844)	(31.405)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,677,824,886	2,631,185,595	46,639,291	1.773
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,674,242,311)	(2,631,185,595)	(43,056,716)	1.636
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,674,242,311)	(2,631,185,595)	(43,056,716)	1.636
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,674,242,311)	(2,631,185,595)	(43,056,716)	1.636

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652080

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 9:52 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**3,224,400**	**3,224,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,224,400	3,224,400	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**3,224,400**	**3,224,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,503,693,000	2,728,143,174	(775,549,826)	78	3,076,445,000	2,322,808,069	753,636,931	76
1. Belanja Pegawai	2,036,630,000	1,558,615,664	(478,014,336)	77	1,980,702,000	1,437,877,673	542,824,327	73
2. Belanja Barang	1,090,863,000	817,027,510	(273,835,490)	75	1,095,743,000	884,930,396	210,812,604	81
3. Belanja Modal	376,200,000	352,500,000	(23,700,000)	94	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**
ESELON I : **BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01**
SATUAN KERJA : **PENGADILAN AGAMA BONTANG 652080**

Tgl Data : 15/10/24 6:37 AM
Tgl Cetak : 15/10/24 9:52 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Transfer Umum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c. Dana Keistimewaan DIY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d. Dana Otonomi Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Hibah Kepada Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**3,503,693,000**	**2,728,143,174**	**(775,549,826)**	**78**	**3,076,445,000**	**2,322,808,069**	**753,636,931**	**76**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

YURI ADI DHARMA
NIP 198501172006041001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 9:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	21,000,000	0	21,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	358,175	0	358,175	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	358,175	0	358,175	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**21,358,175**	**0**	**21,358,175**	
ASET TETAP				
Tanah	2,042,591,548	2,042,591,548	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,927,836,878	2,563,836,878	364,000,000	14.20
Gedung dan Bangunan	5,845,037,768	5,845,037,768	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,427,109	3,427,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,287,632,686)	(3,157,879,425)	(129,753,261)	4.11
JUMLAH ASET TETAP	**7,531,260,617**	**7,297,013,878**	**234,246,739**	**3.21**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,950,000	4,950,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,950,000)	(4,950,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**7,552,618,792**	**7,297,013,878**	**255,604,914**	**3.50**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	161,752,895	2,665,444	159,087,451	5,968.52
Utang Yang Belum Ditagihkan	14,491,000	0	14,491,000	0.00
Hibah Yang Belum Disahkan	11,500,000	0	11,500,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	21,000,000	0	21,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**208,743,895**	**2,665,444**	**206,078,451**	**7,731.49**
JUMLAH KEWAJIBAN	**208,743,895**	**2,665,444**	**206,078,451**	**7,731.49**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,343,874,897	7,294,348,434	49,526,463	0.68
JUMLAH EKUITAS	**7,343,874,897**	**7,294,348,434**	**49,526,463**	**0.68**
JUMLAH EKUITAS	**7,343,874,897**	**7,294,348,434**	**49,526,463**	**0.68**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**7,552,618,792**	**7,297,013,878**	**255,604,914**	**3.50**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 9:54 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

NIP 198501172006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 9:52 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,294,348,434	7,540,053,842	(245,705,408)	(3.26)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,674,242,311)	(2,631,185,595)	(43,056,716)	1.64
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,150,000)	0	(1,150,000)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,150,000)	0	(1,150,000)	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,724,918,774	2,351,114,319	373,804,455	15.9
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	49,526,463	(280,071,276)	329,597,739	(117.68)
EKUITAS AKHIR	7,343,874,897	7,259,982,566	83,892,331	1.16

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

NIP 198501172006041001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**	Tanggal	: 29/10/24 7:23 AM
WILAYAH/PROVINSI	**: 1600**	**KALIMANTAN TIMUR**	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	**: 652080**	**PENGADILAN AGAMA BONTANG**	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**		Tgl Data	: 29/10/24 2:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	786,647,000	786,647,000	614,676,540	0	614,676,540	78.14	171,970,460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	17,000	7,862	722	7,140	46.25	9,860
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	63,000,000	63,000,000	53,253,090	0	53,253,090	84.53	9,746,910
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,400,000	22,400,000	17,556,948	0	17,556,948	78.38	4,843,052
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	22,110,000	0	22,110,000	78.57	6,030,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	761,040,000	761,040,000	590,930,000	0	590,930,000	77.65	170,110,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	123,286,000	123,286,000	83,729,846	0	83,729,846	67.92	39,556,154
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	50,000,000	50,000,000	40,193,100	0	40,193,100	80.39	9,806,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	110,880,000	110,880,000	81,749,000	0	81,749,000	73.73	29,131,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,220,000	10,220,000	5,810,000	0	5,810,000	56.85	4,410,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	81,000,000	81,000,000	48,600,000	0	48,600,000	60	32,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,036,630,000	2,036,630,000	1,558,616,386	722	1,558,615,664	76.53	478,014,336
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,036,630,000	2,036,630,000	1,558,616,386	722	1,558,615,664	76.53	478,014,336
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	536,452,000	524,661,000	376,462,892	0	376,462,892	71.75	148,198,108
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	1,200,000	748,154	0	748,154	62.35	451,846
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43,128,000	32,520,000	21,680,000	0	21,680,000	66.67	10,840,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,500,000	10,500,000	8,120,000	0	8,120,000	77.33	2,380,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	586,280,000	568,881,000	407,011,046	0	407,011,046	71.55	161,869,954
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	16,000,000	12,741,300	0	12,741,300	79.63	3,258,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,000,000	16,000,000	12,741,300	0	12,741,300	79.63	3,258,700
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	3,600,000	3,192,000	2,234,935	0	2,234,935	70.02	957,065
522113	Belanja Langganan Air	4,800,000	4,800,000	3,555,750	0	3,555,750	74.08	1,244,250
522141	Belanja Sewa	54,840,000	54,840,000	41,817,481	0	41,817,481	76.25	13,022,519
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	63,240,000	62,832,000	47,608,166	0	47,608,166	75.77	15,223,834
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	159,600,000	228,499,000	186,485,161	0	186,485,161	81.61	42,013,839
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	35,400,000	11,682,000	9,341,500	0	9,341,500	79.96	2,340,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147,283,000	132,229,000	98,034,301	0	98,034,301	74.14	34,194,699

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: **005**	**MAHKAMAH AGUNG**	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: **01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**	Tanggal	: 29/10/24 7:23 AM
WILAYAH/PROVINSI	: **1600**	**KALIMANTAN TIMUR**	Halaman	: 2
SATUAN KERJA	: **652080**	**PENGADILAN AGAMA BONTANG**	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: **KD**		Tgl Data	: 29/10/24 2:35 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	342,283,000	372,410,000	293,860,962	0	293,860,962	78.91	78,549,038
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,060,000	70,740,000	55,806,036	0	55,806,036	78.89	14,933,964
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	79,060,000	70,740,000	55,806,036	0	55,806,036	78.89	14,933,964
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,090,863,000	1,090,863,000	817,027,510	0	817,027,510	74.9	273,835,490
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376,200,000	376,200,000	352,500,000	0	352,500,000	93.7	23,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	376,200,000	376,200,000	352,500,000	0	352,500,000	93.7	23,700,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	376,200,000	376,200,000	352,500,000	0	352,500,000	93.7	23,700,000
	JUMLAH BELANJA	3,503,693,000	3,503,693,000	2,728,143,896	722	2,728,143,174	77.86	775,549,826

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**	Tanggal	: 29/10/24 7:25 AM
WILAYAH/PROVINSI	**: 1600**	**KALIMANTAN TIMUR**	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	**: 652080**	**PENGADILAN AGAMA BONTANG**	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**		Tgl Data	: 20/5/24 2:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	713,146,000	801,462,000	617,046,640	0	617,046,640	76.99	184,415,360
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,000	17,000	10,757	4	10,753	63.28	6,247
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	71,315,000	71,315,000	48,257,928	0	48,257,928	67.67	23,057,072
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,390,000	22,023,000	16,829,822	0	16,829,822	76.42	5,193,178
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	18,870,000	0	18,870,000	67.06	9,270,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	766,990,000	666,990,000	486,660,000	0	486,660,000	72.96	180,330,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	117,468,000	87,468,000	55,481,030	0	55,481,030	63.43	31,986,970
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	45,386,000	54,273,000	41,641,500	0	41,641,500	76.73	12,631,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	110,880,000	147,612,000	104,550,000	0	104,550,000	70.83	43,062,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,970,000	20,402,000	8,030,000	0	8,030,000	39.36	12,372,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	81,000,000	81,000,000	40,500,000	0	40,500,000	50	40,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,980,702,000	1,980,702,000	1,437,877,677	4	1,437,877,673	72.59	542,824,327
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,980,702,000	1,980,702,000	1,437,877,677	4	1,437,877,673	72.59	542,824,327
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	535,656,000	561,537,000	422,652,827	0	422,652,827	75.27	138,884,173
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,488,000	1,488,000	671,000	0	671,000	45.09	817,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,756,000	58,560,000	39,808,000	0	39,808,000	67.98	18,752,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,500,000	2,500,000	1,646,500	0	1,646,500	65.86	853,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	621,400,000	624,085,000	464,778,327	0	464,778,327	74.47	159,306,673
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,268,000	7,268,000	7,268,000	0	7,268,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,268,000	7,268,000	7,268,000	0	7,268,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	13,000,000	8,998,000	0	8,998,000	69.22	4,002,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,000,000	13,000,000	8,998,000	0	8,998,000	69.22	4,002,000
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	7,200,000	5,160,000	3,312,302	0	3,312,302	64.19	1,847,698
522113	Belanja Langganan Air	4,800,000	4,092,000	2,894,250	0	2,894,250	70.73	1,197,750
522141	Belanja Sewa	54,840,000	54,840,000	54,783,980	0	54,783,980	99.9	56,020
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	66,840,000	64,092,000	60,990,532	0	60,990,532	95.16	3,101,468
5231	Belanja Pemeliharaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1600**	**KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 652080**	**PENGADILAN AGAMA BONTANG**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/10/24 7:25 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 20/5/24 2:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228,486,000	192,844,000	189,015,595	0	189,015,595	98.01	3,828,405
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100,709,000	111,494,000	96,933,397	0	96,933,397	86.94	14,560,603
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	329,195,000	304,338,000	285,948,992	0	285,948,992	93.96	18,389,008
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,040,000	82,960,000	56,946,545	0	56,946,545	68.64	26,013,455
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51,040,000	82,960,000	56,946,545	0	56,946,545	68.64	26,013,455
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,095,743,000	1,095,743,000	884,930,396	0	884,930,396	80.76	210,812,604
	JUMLAH BELANJA	3,076,445,000	3,076,445,000	2,322,808,073	4	2,322,808,069	75.5	753,636,931

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 8:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	21,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	358,175	0
0.0	131111	Tanah	2,042,591,548	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,927,836,878	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,845,037,768	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,427,109	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,309,575,394
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	978,057,292
0.0	162151	Software	4,950,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,950,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	137,540,895
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	24,212,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	14,491,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	0	11,500,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	21,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,728,143,174
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,224,400	0
0.0	391111	Ekuitas	0	7,294,348,434
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,150,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,582,575
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	674,147,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,931	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58,433,550	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,234,654	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	24,120,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	644,990,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	89,087,664	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	44,031,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	81,749,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,355,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	54,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	396,781,192	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	675,654	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21,680,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,120,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,123,441	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,208,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	41,817,481	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 12:37 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 8:10 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,705,161	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9,341,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101,789,301	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	59,026,036	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62,161,949	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66,441,312	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	13,797,300	0
JUMLAH			**13,527,400,764**	**13,527,400,764**

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

NIP 198501172006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 15/10/24 6:23 AM

Tgl Cetak : 15/10/24 9:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,728,143,174
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,224,400	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,224,400
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	614,676,540	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,862	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	53,253,090	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,556,948	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22,110,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	590,930,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	83,729,846	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40,193,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	81,749,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,810,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	48,600,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	376,462,892	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	748,154	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	21,680,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,120,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,741,300	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,234,935	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,555,750	0
3.0	522141	Belanja Sewa	41,817,481	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	186,485,161	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9,341,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,034,301	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,806,036	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352,500,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	722
		JUMLAH	**2,731,368,296**	**2,731,368,296**

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 15 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

YURI ADI DHARMA

198501172006041001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KPPN SAMARINDA

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 652080
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3503693000	3503693000	0
2	Belanja	2728143896	2728143896	0
3	Pengembalian Belanja	-722	-722	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3224400	3224400	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	21000000	21000000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	21000000	21000000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-OCT-24